

## Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten

### Pada Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Pemilu Tahun 2024

(TANGGAL 16 – 24 AGUSTUS 2022)

1. Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan **pencermatan terhadap nama dan NIK** Ketua dan Anggota serta pegawai pada lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada laman [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari\\_nik](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik), dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Terhadap data ini, secara mandiri masing-masing telah melakukan mekanisme penyampaian Form Tanggapan Masyarakat yang telah disediakan oleh KPU melalui [helpdesk.kpu.go.id/tanggapan](https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan) dengan mengunggah Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik dan Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan Partai Politik;
  - b. Tidak ada Notifikasi/Pemberitahuan/Tindak Lanjut dari penyampaian Form Tanggapan Masyarakat dari KPU RI.
2. Berdasarkan hasil pengawasan melalui akun SIPOL Bawaslu pada tanggal 16 s.d 24 Agustus 2022, Bawaslu Provinsi Banten mengalami kendala yakni **penggunaan akses yang terbatas pada SIPOL**, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Hari pertama hingga hari ketiga Verifikasi Administrasi, pengawasan yang dilakukan melalui akun sipol mengalami berbagai macam kendala jaringan/server dalam mengakses SIPOL seperti munculnya kode error 401, 500, 501, 502 dan sistem yang secara otomatis *log out*.
  - b. Terjadi perubahan fitur-fitur dalam aplikasi sipol diantaranya:
    - untuk mengakses submenu Keanggotaan Partai Politik, Bawaslu tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik;
    - untuk mengakses submenu Profil Partai Politik, Bawaslu tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen pada menu tersebut diantaranya Surat Keterangan Lambang, Berita Negara Republik Indonesia, Akta Notaris, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    - pada pencarian keanggotaan Partai Politik, pernah tidak bisa melakukan pencarian *search by name*.
3. Dalam pengawasannya, Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terdapat beberapa hal yang masih miskomunikasi dengan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, contohnya **pembatasan akses ketika melakukan pengawasan secara langsung** di KPU, sehingga cukup menghambat kinerja Bawaslu ketika melakukan pengawasan langsung verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten telah selesai melakukan pengawasan verifikasi administrasi partai politik Pemilu 2024 pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022.

5. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Banten menemukan identitas dengan profesi yang dilarang terlibat dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai politik dengan total sejumlah 140 Orang diantaranya sebagai berikut: (Rincian Data Terlampir)

Profesi	Jumlah
PNS	123
POLRI	7
TNI	5
Kepala Desa	5
Penyelenggara	2
Pegawai BUMN	1
<b>Total</b>	<b>140</b>

6. Terhadap data PNS, TNI, dan POLRI yang tercatat menjadi anggota Partai Politik masih dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Dalam melakukan tindak lanjut terhadap data nama-nama yang tercatat dalam kepengurusan atau keanggotaan partai politik, Bawaslu Provinsi Banten telah menyampaikan data tersebut kepada KPU Provinsi Banten.
8. Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Banten telah membuka Posko Pengaduan bagi masyarakat yang melakukan pengecekan secara mandiri nama dan NIK nya untuk melihat tercatat atau tidak dalam kepengurusan atau keanggotaan partai politik dan dapat menyampaikannya dengan melakukan *Barcode Scan* / pengisian *Google form*. Terdapat 4 (empat) orang yang melakukan pengaduan namanya tercatat pada keanggotaan partai politik, selanjutnya Bawaslu Provinsi Banten menghimbau kepada masyarakat yang tidak mendaftar namun tercatat dalam kepengurusan atau keanggotaan partai politik untuk menyampaikan form tanggapan masyarakat melalui *help desk* KPU RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tim Fasilitasi Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024.  
Bawaslu Provinsi Banten**